

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA LANGSUNG DAN BEBAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BITUNG.

ANALYSIS RECORDING AND REPORTING DIRECT EXPENDITURE AND EXPENSES AT THE OFFICE AND MANPOWER AND TRANSMIGRATION BITUNG

Oleh:

Jemy Billy Massie¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

e-mail:

jemybillym@rocketmail.com

Abstrak: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kinerja tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pencatatan dan pelaporan belanja langsung serta beban yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagai acuannya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi untuk pengumpulan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung telah melakukan proses pencatatan akuntansinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Pimpinan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung sebaiknya untuk tahun Anggaran dalam pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman sepenuhnya pada aturan-aturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar efektif dapat terwujud, Laporan Keuangan yang disajikan dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

Kata kunci : *pencatatan, pelaporan keuangan, belanja langsung, beban*

Abstract: *Work Units (SKPD) is an accounting entity that has the obligation to keep records of transactions that occur in the environment of the unit's performance. The purpose of this study is to know about the recording and reporting of direct expenditure as well as the burden will be undertaken by the Department of Manpower and Transmigration Bitung based on Government Regulation No. 71 Year 2010 and Regulation No. 64 Year 2013 on Implementation of the Government Accounting Standards Based Accrual on Local Government as a benchmark, This research uses descriptive research design. The author uses interview and documentation study techniques for collecting the necessary data. The results showed that the Office of Manpower and Transmigration Bitung City has made the process of accounting records in accordance with the Regulation of the Minister of the Interior 64 Years 2013 and Government Regulation 71 Year 2010. Leaders of Manpower and Transmigration Bitung preferably for budget year in Regional Financial management is guided entirely on existing rules, so that financial management is really effective can be realized, Financial Statements presented could be useful to the users of these financial statements.*

Keywords: *recording, financial reporting, direct expenditure, expenses*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

SKPD dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bitung selaku entitas akuntansi pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara selaku pejabat fungsional).

Secara umum proses akuntansi SKPD ini terbagi dalam 3 tahapan utama, yaitu pemahaman dasar akuntansi, konsep penjurualan dan posting ke buku besar, serta proses penyusunan laporan keuangan SKPD. Akuntansi bagi SKPD adalah amanat dari PP nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Finansial. Laporan Pelaksanaan Anggaran meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan SAL, sementara itu Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas. Disamping itu SKPD harus menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Karena Laporan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan di atas dihasilkan dari penggabungan laporan berbagai SKPD dan BUD maka agar Pemerintah Daerah dapat menghasilkan LRA dan LO sebagaimana dijelaskan di atas, Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun LRA dan LO. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah menyajikan informasi mengenai pendapatan dan belanja baik anggaran maupun realisasinya yang pengakuannya menggunakan dasar pengakuan sesuai dokumen anggaran. Sementara itu Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang pengakuannya berdasarkan dasar akrual.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Akuntansi Belanja Langsung (LS). Agar pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi asas tertib, ekonomis, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan komprehensif maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, sehingga dapat diperbandingkan, dan tidak menyesatkan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pencatatan dan pelaporan belanja langsung dan Beban pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Irawan, dkk. (2014:9) Menyatakan Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Wiratna (2015:18) Menyatakan Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna mengambil keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan.

Pengelolaan Keuangan Negara

Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Nur, 2013).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan ini memberikan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Nordiawan, dkk (2007:39) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2013 dijelaskan bahwa APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi.
- b. Fungsi perencanaan.
- c. Fungsi pengawasan.
- d. Fungsi alokasi.
- e. Fungsi distribusi.
- f. Fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Proses Penyusunan APBD

Nordiawan, dkk (2007:43), menyatakan setidaknya terdapat enam sub proses dalam penyusunan APBD sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
3. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
5. Penyiapan Rancangan Peraturan SKPD
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang SKPD.

Akuntansi Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PP No 71 th 2010). Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Permendagri 13/2006).

Belanja Tidak Langsung

Hasyim (2009) Menyatakan Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis Belanja Tidak Langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Belanja Langsung

Gahung (2013:27) menjelaskan belanja langsung adalah belanja yang penyelenggaraannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Selanjutnya Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan kegiatan (Aktivitas), Mahmudi (2010:165).

Akuntansi Beban

Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Lampiran 1) menyebutkan bahwa beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Akuntansi Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dalam kontribusi keuangan daerah, terdapat dua jenis Satuan Kerja yaitu:

1. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No 64 Tahun 2013

Dalam Permendagri No 64 Tahun 2013 (Lampiran 1) menyebutkan bahwa kebijakan akuntansi pelaporan keuangan mengatur tentang penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas, serta untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrua. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian Terdahulu

Tampanatu (2013) meneliti tentang Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD di Kota Bitung (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung). Tujuan penelitian untuk Menganalisis pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan Laporan Bendahara Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Berpedoman Pada Permendagri No. 13 thn 2006. Wati (2015) meneliti tentang Analisis Sistem Pelaporan Belanja Langsung Tahun 2013 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian untuk menganalisis sistem pelaporan belanja langsung tahun 2013 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pelaporan belanja sesuai dengan acuan yang telah disusun sebelumnya yaitu DPA dan aturan yang berlaku. Lomboan (2014) meneliti tentang Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian Untuk mengetahui tingkat varians (selisih), tingkat pertumbuhan dan efisiensi Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-

2013. Hasil penelitian menunjukkan Varians belanja tahun 2010-2013 dengan selisih negatif masuk kategori *vafourable variance*, tingkat pertumbuhan belanja tertinggi pada tahun 2011, dan pertumbuhan belanja terendah pada tahun 2012 dan tingkat efisiensi belanja terjadi tahun 2010-2013 dengan hasil rata-rata dibawah 100% sehingga belanja langsung dapat dikatakan efisien

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah berupa studi deskriptif yang menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu obyek penelitian.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2016. Sedangkan tempat penelitian dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung.

Jenis Data

1. Data Primer; Yaitu Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengupulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kota Bitung.
2. Data Sekunder; Data yang telah diolah sehingga menjadi lebih informative dan langsung dapat dipergunakan. Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain :
 - a. Sejarah singkat DISNAKERTRANS Bitung
 - b. Struktur organisasi DISNAKERTRANS Bitung
 - c. Sistem Akuntansi Keuangan pada DISNAKERTRANS Bitung

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan dalam dua cara yakni:

1. Riset Lapangan; Yaitu mengumpulkan data-data primer dengan datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung, kemudian melakukan:
 - a. Wawancara, dengan menanyai secara langsung pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung yang terkait
 - b. Observasi, dengan mengadakan peninjauan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Riset Pustaka; Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan ciri dari jenis penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran tentang situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung

1. *Pencatatan Belanja Langsung*

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Contoh jurnal pencatatan belanja langsung pada kantor Disnakertrans Kota Bitung Tahun 2015 berupa beban pegawai, beban barang serta belanja modal. Maka di buat jurnal realisasipencatatan sebagai berikut:

Tabel 1. Pencatatan Belanja Langsung

Jurnal realisasi-LRA			
Tahun	Keterangan	Debet	Kredit
2015	Belanja pegawai	326.912.000	-
	Estimasi Perubahan SAL	-	326.912.000
2015	Belanja Barang	443.389.565	-
	Estimasi Perubahan SAL	-	433.389.565
2015	Belanja Modal	78.276.000	-
	Estimasi Perubahan SAL	-	78.276.000

2. Pelaporan Belanja Langsung

Contoh pelaporan belanja langsung pada kantor Disnakertrans Kota Bitung Tahun 2015 berupa beban pegawai, beban barang dan jasa serta belanja modal. Maka di buat pelaporan menurut Permendagri 64 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Pelaporan Belanja Langsung

Permendagri No 64 Tahun 2013			
Item Transaksi			Nilai
1.	Belanja Operasi	Rp.	770.301.565
	a. Belanja Pegawai	Rp.	326.912.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	443.389.565
2.	Belanja Modal	Rp.	78.276.000
Jumlah		Rp.	848.577.565

3. Penyajian Belanja Langsung

Belanja akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA):

1. Belanja Pegawai dengan total realisasi Rp. 326.912.000 sudah sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013
2. Belanja Barang dan Jasa dengan total realisasi Rp. 443.389.365 sudah sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013
3. Belanja Modal dengan total realisasi Rp. 78.276.000 sudah sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013

Pencatatan dan Pelaporan Beban

1. Pencatatan Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Contoh jurnal belanja langsung yang menghasilkan beban pada kantor Disnakertrans berupa beban pegawai, beban barang dan jasa serta asset tetap. Maka di buat jurnal realisasi beban sebagai berikut:

Tabel 3 Pencatatan Beban

Jurnal realisasi-LO			
Tahun	Keterangan	Debet	Kredit
2015	Beban pegawai	2.654.985.023	-
	RK PPKD	-	2.654.985.023
2015	Beban Barang dan Jasa	770.301.565	-
	Kas di bendahara pengeluaran	-	770.301.565

2015	Kas di bendahara pengeluaran RK PPKD	770.301.565 -	- 770.301.565
-------------	---	------------------	------------------

2. *Pelaporan Beban*

Contoh pelaporan belanja langsung pada kantor Disnakertrans Kota Bitung Tahun 2015 berupa beban pegawai, beban barang dan jasa serta belanja modal. Maka di buat pelaporan menurut Permendagri 64 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Pelaporan Beban

Permendagri No 64 Tahun 2013			Nilai
Item Transaksi			
Belanja Operasi		Rp	3.425.286.588
a. Beban Pegawai – LO		Rp.	2.654.985.023
b. Belanja Barang dan Jasa		Rp	770.301.565
Jumlah		Rp	3.425.286.588

3. *Penyajian Beban*

Beban akan dilaporkan dalam Laporan Operasional (LO):

1. Belanja Pegawai dengan total realisasi Rp. 326.912.000 sudah sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013
2. Belanja Barang dan Jasa dengan total realisasi Rp. 443.389.365 sudah sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013

Laporan Keuangan

Setelah Neraca Saldo setelah penyesuaian disusun, maka langkah selanjutnya PPK-SKPD menyiapkan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian masing-masing Laporan Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

1. **Pos Belanja Langsung**

realisasi belanja langsung tahun anggaran 2015 menunjukkan angka sebesar Rp. 848.577.565 dari total anggaran sebesar Rp. 1.083.000.000, atau sebesar 78,4 % dari jumlah yang dianggarkan yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi Rp. 991.224.000
 - a. Belanja pegawai Rp. 341.376.000
 - b. Belanja barang Rp. 649.848.000
2. Belanja Modal Rp 91.776.000
 - a. Belanja peralatan dan mesin Rp. 79.776.000
 - b. Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 12.000.000

2. **Pos Beban**

Total realisasi beban tahun anggaran 2015 menunjukkan angka sebesar Rp. 3.425.286.588. Jumlah yang direalisasi yang terdiri dari:

- Belanja Operasi Rp. 3.425.286.588
- a. Belanjapegawai – LO Rp. 2.654.985.023
 - b. Belanjabarangdanjasa– LO Rp. 770.301.565

Neraca

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 menunjukkan bahwa aset yang dimiliki sebesar Rp 1.703.924.029 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp198.927.449 dan Aset Tetap sebesar Rp 1.504.996.580. Kewajiban yang dimiliki adalah berupa Kewajiban Jangka Pendek Sebesar Rp 12.745.573. Sedangkan Ekuitas dana yang dimiliki adalah sebesar Rp 1.691.178.456.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2015 menyajikan informasi mengenai :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, dan pencapaian target
- b. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- c. Kebijakan Akuntansi
- d. Penjelasan Laporan pos-pos keuangan
- e. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Pembahasan

Penerapan Akuntansi Belanja

Pencatatan belanja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung sudah dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah baik untuk belanja Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU) maupun untuk belanja LS-Gaji dan Tunjangan dan LS-Barang dan Jasa serta beban. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung sudah menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke perkiraan di buku besar, penyusunan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, menyusun Laporan keuangan dan juga membuat jurnal penutup.

Penerapan Akuntansi Belanja Tidak Langsung

Pencatatan belanja tidak langsung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung sudah dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Belanja tidak langsung di disnakertrans kota bitung hanya belanja pegawai saja dan belanja pegawai terdiri atas 3 bagian yaitu belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, dan intensif pemungutan redistribusi daerah. Yang pertama belanja gaji dan tunjangan terdiri atas 7 bagian yaitu gaji pokok PNS/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus dan pembulatan gaji. Yang kedua belanja tambahan penghasilan PNS yaitu berdasarkan tambahan penghasilan beban kerja.

Penerapan Akuntansi Belanja Langsung

Pencatatan belanja langsung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung sudah dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Belanja langsung terdiri dari 3 bagian yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja langsung di disnakertrans kota bitung terdiri dari 8 program dan 18 kegiatan. Dan hanya 1 kegiatan yang belum teralisasi. Penelitian ini di dukung oleh penelitian sebelumnya pada Tampanatu (2013), hasil penelitiannya bahwa Laporan Bendahara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Berpedoman pada Permendagri No 13 Tahun 2006 atau dengan kata lain masih menggunakan aturan yang lama pada saat diteliti. Selanjutnya pada Wati (2015), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pelaporan belanja langsung sesuai dengan acuan yang telah disusun sebelumnya yaitu DPA dan aturan yang berlaku. Dengan demikian dari dua penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian ini bahwa dalam pelaporannya pemerintah tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun untuk saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung sedang mempersiapkan untuk menerapkan aturan yang terbaru dari pemerintah.

Penerapan Akuntansi Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Akuntansi beban pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung meliputi belanja barang dan pegawai. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari Penelitian ini:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan baik untuk akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi asset serta beban sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada. Kegiatan pencatatan tersebut meliputi :Jurnal, Buku Besar, NeracaSaldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian dan Jurnal Penutup. Kegiatan pencatatan ini berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya Tahun Anggaran 2015) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Beban, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan secara tepat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
3. Penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2015 mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Saran

Saran yang dapat diberikan:

1. Untuk tahun Anggaran berikutnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung dalam pengelolaan Keuangan Daerah harus lebih berpedoman sepenuhnya kepada peraturan-peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud dan Laporan Keuangan yang disajikan dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.
2. Perlu adanya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD. Sumber Daya Manusia ini dapat diperoleh melalui perekrutan pegawai dengan kualifikasi di bidang akuntansi yang memadai serta melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SDM yang sudah ada.
3. Bagisetiap SKPD hendaknya menggunakan system komputerisasi yang dapat mempermudah pekerjaan pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan dan memanfaatkannya bagi pengendalian manajemen keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan Arif Surya, Heince Wokas, M Khoiru Rusydi, Doddy Hardiana, Syamsa Artha, 2014. *Materi Pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah dan SKPD. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Jakarta
- Nordiawan Dedi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2007, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.

- Gahung, Yesi, 2012. *Analisis Pengakuan dan Pelaporan Atas Belanja Langsung pada kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD)*. Skripsi (tidak dipublikasi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal 26-27.
- Hasyim, Hadi Muttaqin, 2009. *Contoh Skripsi (Tugas Akhir) Anggaran Belanja Tidak Langsung (Bandget Accounting)*. <https://muttaqinhasyim.wordpress.com>. Diakses tanggal 7 Mei 2016.
- Lomboan, Syurtika Mira, 2014. *Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA 955 Vol.2 No.3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado. <file:///C:/Users/User/Downloads/5735-11153-1-SM.pdf>. Diakses tanggal 22 Desember 2015. Hal. 952-961.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nur, Ahmad, 2013. *Pengertian Dan Ruang Lingkup Keuangan Negara*. <http://rakaraki.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-keuangan.html>. diakses tanggal 8 April 2016
- Tampanatu, Anastasia P. T., 2013. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD di Kota Bitung*. Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 4. . Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1943/1540>. Diakses 5 Oktober 2014. Hal. 90-97.
- Wati, Rivaldy, 2015. *Analisis Sistem Pelaporan Belanja Langsung Tahun 2013 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA 418 Vol.3 No.1.Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=292078&val=1025&title=ANALISIS%20SISTEM%20PELAPORAN%20BELANJA%20LANGSUNG%20TAHUN%202013%20PADA%20%20BADA%20N%20PENGELOLA%20KEUANGAN%20DAN%20BARANG%20MILIK%20DAERAH%20%20PR%20OVINSI%20SULAWESI%20UTARA>. Diakses tanggal 31 Oktober 2015. Hal. 408-417.
- Wiratna, Sujarweni V., 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.